

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PENERIMAAN KAS PD BPR NTB CABANG SELONG LOMBOK TIMUR

Baiq Nini Ifani Rahayu¹

baiqniniifani@gmail.com

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram

Baiq Anggun Hilendri Lestari²

hilendria@unram.ac.id

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram

Lalu Takdir Jumaidi³

takdirjumaidi@unram.ac.id

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram

ABSTRAK

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengevaluasi penerapan sistem pengendalian internal PD BPR NTB Lombok Timur khususnya mengenai penerimaan kas. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi dan observasi terkait dengan sistem pengendalian intern penerimaan kas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PD BPR NTB Lombok Timur telah cukup baik dalam melaksanakan sistem pengendalian intern terkait dengan penerimaan kas baik dari pemisahan tugas, pemberian wewenang, pengamanan asset dan dokumen penting serta catatan dan dokumen yang digunakan telah memadai. Namun masih kurangnya perputaran jabatan atau posisi terkait di bagian penerimaan kas seperti kasir sehingga jika terjadi perputaran jabatan, maka dapat mengurangi potensi kecurangan, penyalahgunaan dokumen terkait kas.

Kata Kunci: Sistem Pengendalian Intern, Penerimaan Kas, Perputaran jabatan

ABSTRACT

This study is intended to evaluate the application of the internal control system of PD BPR NTB East Lombok, especially regarding cash receipts. Data collection techniques using interview, documentation and observations related to the internal control system of cash receipts. The results showed that PD BPR NTB Lombok Timur was quite good in implementing the internal control system related to cash receipts both from segregation of duties, granting authority, securing assets and important documents as well as records and documents used were adequate. However, there is still a lack of job rotation or related positions in cash receipts such as cashiers so that if there is a rotation of positions, it can reduce the potential for fraud, misuse of cash-related documents.

Keywords: Internal Control System, Cash Receipts, Job rotation

PENDAHULUAN

Kas merupakan aktiva yang paling rentan untuk disalahgunakan (Sari, 2013). Kas mempunyai sifat mudah untuk di pindah tangankan dan tidak dapat di buktikan kepemilikannya sehingga kas sangat mudah digelapkan dan dimanipulasi. Untuk itu, diperlukan adanya pengendalian yang tepat khususnya terkait dengan transaksi kas (Rahayu, 2018). Namun berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) Semester I tahun 2013 yang disampaikan oleh Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Hadi Poernomo mengungkapkan BPK menemukan sebanyak 13.969 kasus kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap perundangundangan senilai Rp56,98 triliun. Dari jumlah tersebut sebanyak 4.589 kasus senilai Rp10,74 triliun berupa ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian dan kekurangan penerimaan (BPK, 2013).

BPK mencatat potensi kerugian negara mencapai Rp773,8 miliar dari tiga badan usaha milik daerah atau BUMD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Pada tahun 2021. Pencatatan tersebut berawal dari ikhtisar hasil pemeriksaan semester II tahun 2020 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang disahkan oleh Ketua BPK RI yaitu Agung Firman Sampurna. Potensi kerugian pertama berasal dari temuan kelebihan bayar subsidi mencapai Rp415,9 miliar dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PT Transjakarta atau Transjakarta pada tahun buku 2018 dan 2019. Potensi kerugian kedua berasal dari proyek pembangunan menara telekomunikasi yang dikerjakan pada tahun 2015 hingga 2018. BPK mengidentifikasi adanya penyimpangan anggaran mencapai Rp341,9 miliar dari proyek yang dikerjakan oleh PT Jakarta Propertindo atau Jakpro tersebut. Selanjutnya, BPK mengidentifikasi, adanya penyimpangan pelaksanaan dan pembayaran pekerjaan pembangunan infrastruktur *gygabite passive optic network* (GPON) sebesar Rp104,14 miliar dan permasalahan lainnya senilai Rp16,59 miliar. BPK juga memeriksa Perumda Pasar Jaya yang belum memperoleh penerimaan dari mitra kerja atas kompensasi pengelolaan parkir tahun 2019 dan 2020 serta pajak parkir sebesar Rp11,36 miliar. Selain itu, BUMD tersebut juga belum menerima kompensasi pengelolaan reklame digital dan non digital tahun 2020 dan denda sebesar Rp3,03 miliar serta penerimaan lainnya sebesar Rp1,61 miliar (Wahyudi, 2021)

Salah satu upaya BUMD untuk mengatasi persoalan ini yaitu menggunakan 4 prosedur pengendalian internal secara umum yang terdiri dari pemberian wewenang kepada karyawan, keamanan asset dan catatan, pemisahan tugas, wewenang dan fungsi karyawan serta pencatatan dan dokumentasi yang memadai (Susanto, 2017). Pengendalian internal ini merupakan rencana BUMD dan metode serta tindakan yang diadopsi dalam bisnis untuk melindungi asetnya, memelihara catatan yang secara akurat dan wajar mencerminkan aset perusahaan, memeriksa keakuratan dan keandalan data akuntansinya, memberikan jaminan bahwa pelaporan keuangan disiapkan dalam sesuai dengan GAAP, mempromosikan efisiensi operasional, mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, dan mendorong kepatuhan terhadap kebijakan manajerial yang ditentukan. Yang mana sistem pengendalian internal yang dipilih atau dikembangkan harus terus dipantau, dievaluasi, dan dimodifikasi sesuai kebutuhan. Setiap kekurangan harus dilaporkan kepada manajemen senior dan dewan direksi (Romney & Steinbart, 2017)

Sistem pengendalian akuntansi yang baik selain dapat menjamin kekayaan perusahaan juga dapat menjamin kekayaan para investor dan kreditur yang ditanamkan pada perusahaan serta akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat di pertanggung jawabkan. Sistem pengendalian administrasi meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen (Ardiansyah R, 2012).

Penelitian yang terkait dengan sistem pengendalian internal penerimaan kas belum banyak di Indonesia. Sari (2013) menyebutkan terdapat 6 tahap pengendalian yaitu pemisahan tugas, pembinaan sumber daya manusia, pengendalian fisik atas asset, reuiu atas kinerja kerja, pembatasan akses ke dalam sistem dan otorisasi atas transaksi dan kejadian penting dengan hasil penelitian menunjukkan pengendalian intern yang ada telah berjalan memadai (cukup), namun masih ada kecurangan yang dilakukan para karyawan untuk mencuri kas. Hasil ini menunjukkan bahwa pihak rumah sakit seharusnya lebih baik lagi memantau segala aktivitas yang ada serta memperkuat agar dapat dari segala bentuk kecurangan.

Basrie et al. (2011) menggunakan 4 sistem pengendalian internal yaitu adanya suatu struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tepat,

adanya sistem wewenang dan prosedur pembukuan yang baik, praktek-praktek yang sehat dan fungsi-fungsi setiap bagian dalam organisasi, karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawab. Hasil dari penelitian ini pengendalian intern atas piutang PT. Senjaya Rezeki Mas juga cukup baik dimana telah terdapat pemisahan fungsi yang mencatat piutang kekartu piutang dengan fungsi yang menyelenggarakan buku besar, sehingga dapat memudahkan pengawasan atas terdapatnya perbedaan/kesalahan pencatatan yang terjadi. Tetapi masih terdapat beberapa kelemahan pada pengendalian intern atas piutang pada PT. Senjaya.

Ardiansyah R (2012) menggunakan 4 sistem pengendalian yaitu struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, praktik yang sehat, karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak melakukan pemisahan fungsi antara fungsi penjualan dengan fungsi kas sedangkan untuk pengendalian lainnya dapat dinyatakan cukup memadai.

Berdasarkan hasil-hasil penelitian diatas, kecurangan (fraud) yang terjadi bisa saja dikarenakan kurang maksimalnya sistem pengendalian internal yang terjadi pada perusahaan-perusahaan tersebut baik dari strukturisasi atau dari faktor operasional sendiri. Itulah mengapa pentingnya maksimalisasi sistem pengendalian internal tak terkecuali dalam perusahaan daerah BPR NTB Lombok Timur. PD BPR NTB Lombok Timur merupakan salah satu badan usaha milik daerah Kabupaten Lombok Timur yang bergerak dibidang peminjaman kepada masyarakat. Yang mana artinya perusahaan daerah ini sangat memperhatikan sistem pengendalian yang terjadi dalam perusahaan tersebut khususnya pengendalian internal terhadap penerimaan kas mengingat kas sangat mudah disembunyikan ataupun dipindahtanggankan. Perusahaan ini memiliki perhatian yang lebih terhadap aliran kas yang terjadi dalam perusahaan karena bisa dikatakan salah satu sumber pendapatan terbesar perusahaan adalah berasal dari kas. Untuk itu, perlu dilakukan penelitian kembali khususnya terkait penerimaan kas yang ada di BPR NTB cabang Selong Lombok Timur. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengevaluasi pelaksanaan sistem pengendalian internal atas penerimaan kas PD BPR NTB Lombok Timur

TINJAUAN LITERATUR

Konsep teori agensi menjelaskan manajemen sebagai *agent* semestinya mengutamakan kepentingan pemegang saham, akan tetapi tidak menutup kemungkinan manajemen hanya mementingkan kepentingannya sendiri untuk memaksimalkan utilitasnya sendiri. Manajemen dapat melakukan tindakan-tindakan yang tidak menguntungkan perusahaan secara keseluruhan yang dalam jangka panjang bisa merugikan kepentingan perusahaan. Bahkan untuk mencapai kepentingannya sendiri, manajemen dapat bertindak menggunakan akuntansi sebagai alat untuk melakukan penipuan. Pertentangan kepentingan antara *principal* dan *agent* dapat menimbulkan permasalahan yang dalam *Agency Theory* dikenal sebagai *Asymmetric Information (AI)* yaitu informasi yang tidak seimbang yang disebabkan karena adanya distribusi informasi yang tidak sama antara *principal* dan *agent*. Ketergantungan pihak eksternal pada akuntansi, kecenderungan manajer untuk mencari keuntungan sendiri dan tingkat AI yang tinggi menyebabkan keinginan bagi manajer untuk melakukan penipuan untuk kepentingan diri sendiri (Scott, 2015). Manajemen bisa melakukan tindakan-tindakan yang tidak menguntungkan perusahaan secara keseluruhan yang dalam jangka panjang bisa merugikan kepentingan perusahaan. Bahkan untuk mencapai kepentingannya

sendiri, manajemen bisa bertindak menggunakan akuntansi sebagai alat untuk melakukan rekayasa, oleh karena itu, masalah keagenan muncul ketika terjadi perbedaan kepentingan antara pemilik saham perusahaan dengan manajer investasi sebagai *agent*. Pemegang saham sebagai penyedia dana dan fasilitas, memiliki kepentingan mengamankan dana dan fasilitas tersebut atas operasi perusahaan karena pemegang saham berkepentingan atas keamanan dana yang telah diinvestasikan dalam perusahaan. Manajer sendiri sebagai pengelola perusahaan mendapatkan gaji dari perusahaan, sehingga keputusan-keputusan yang diambil manajer diharapkan dapat memakmurkan pemegang saham dan dapat meningkatkan nilai perusahaan (Aryani, 2011).

Fokus teori keagenan adalah menentukan kontrak yang paling efisien yang mengatur hubungan principal dengan agent, mengingat asumsi tentang orang (kepentingan pribadi, rasionalitas terbatas, penghindaran risiko), organisasi (konflik atau ketidaksesuaian tujuan) dan informasi (asimetri informasi antara principal dan agent). Masalah keagenan adalah masalah esensial bagi prinsipal, dan muncul karena agent memiliki informasi pribadi tentang niat, kemampuan, dan perilaku prinsipal. Ada dua masalah keagenan: misrepresentasi kemampuan (yaitu, seleksi yang merugikan) dan kurangnya usaha (yaitu moral hazard), yang keduanya dikaitkan dengan agent. Ketika masalah keagenan ada, principal memiliki dua pilihan dasar yaitu pertama mengurangi/menghilangkan konflik tujuan, yang bertanggung jawab atas motivasi untuk menipu dan kedua mengurangi/menghilangkan asimetri informasi, yang bertanggung jawab atas kemampuan untuk menipu (Delbufalo, 2018)

Konflik kepentingan muncul akibat dari adanya agent yang ditunjuk oleh principal guna memisahkan fungsi antara pengambilan keputusan (fungsi pengelolaan) dengan penanggung risiko (fungsi kepemilikan) yang mana konflik kepentingan inilah yang menjadi pokok masalah dalam teori keagenan sehingga memicu munculnya masalah keagenan (*agency problem*). Dengan adanya pemisahan fungsi pengelolaan dan kepemilikan, para pengambil keputusan tidak perlu menanggung risiko atas kebijakan – kebijakan bisnis yang diambil, semuanya menjadi tanggung jawab pemilik. Dalam hal ini *agent* dalam posisi yang tidak menguntungkan karena tidak adanya kepastian bahwa manajer pengelola bekerja secara optimal dan sesuai dengan tujuan atau keinginan *agent*, inilah gambaran tentang masalah keagenan. Untuk menjamin agar para manajer melakukan yang terbaik bagi pemegang saham secara maksimal, perusahaan harus menanggung biaya keagenan (*Agency cost*). Berdasarkan kondisi semacam ini, dibutuhkan sistem pengendalian internal yang baik pada perusahaan yang merujuk pada kerangka aturan dan prosedur yang memungkinkan untuk membuat perusahaan memaksimalkan nilai dan untuk mencapai tujuan bersama (Pratama, 2012).

Keterkaitan teori keagenan dengan penelitian ini yaitu terletak pada tujuan antara perusahaan dan pemilik dalam penerapan sistem pengendalian internal pada siklus penerimaan kas, yang mana tujuan tersebut adalah mendapatkan keuntungan. Namun, perbedaan dari tujuan tersebut dilihat dari bagaimana keduanya mendapatkan keuntungan. Perusahaan sebagai *principal* memenuhi tugas dan tanggung jawabnya atas pemilik perusahaan selaku *agent* untuk pemberian wewenang dan pemisahan tugas kepada karyawannya yang merupakan bagian dari perusahaan sehingga dapat mencapai tujuan perusahaan dan dapat dipertanggung jawabkan kepada pemilik. Untuk itu, perlu adanya sistem pengendalian internal sehingga tujuan bersama yaitu mencapai keuntungan dapat terealisasi tanpa adanya penyelewengan dari pihak manapun.

Pertahanan pertama terhadap penyelewengan keuangan adalah pengendalian intern. Sistem pengendalian intern yang komprehensif, diterapkan secara menyeluruh dan

memonitor secara reguler aktivitas suatu organisasi merupakan langkah penting untuk menjaga dan mendeteksi resiko kerugian yang diakibatkan oleh penyelewengan dibidang keuangan. Saat ini peran internal dan eksternal auditor sangat penting dalam mendeteksi adanya penyelewengan keuangan yang beresiko merugikan perusahaan. Khususnya bagi aktivitas penerimaan kas yang bisa dibilang merupakan aktivitas paling penting yang ada di perusahaan yang menyangkut pendapatan perusahaan.

Committee of sponsoring organizations (COSO) dari Treadway Commission (komisi nasional Amerika untuk penyelewengan laporan keuangan) menyatakan bahwa dasar bagi dilakukannya pengendalian intern adalah tujuan. Tanpa tujuan pengendalian intern tidak ada artinya apa-apa. Selanjutnya COSO menyatakan bahwa pengendalian intern meliputi pula dorongan yang diberikan kepada seseorang atau karyawan bagian tertentu dari organisasi atau organisasi secara keseluruhan agar berjalan sesuai dengan tujuan. Karena itu pengendalian intern dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen, dan karyawan yang dirancang untuk memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa tujuan organisasi akan dapat dicapai melalui efisiensi dan efektifitas operasi, penyajian laporan keuangan yang dapat dipercaya serta ketaatan terhadap undang-undang dan aturan yang berlaku (Susanto, 2017).

PD BPR NTB Cabang Selong sebagai *principal* juga memenuhi tugas dan tanggung jawabnya atas pemilik perusahaan selaku *agent*. Hal ini juga sejalan dengan fungsi dan tujuan dibentuknya yaitu untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya; menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan memperoleh laba dan/atau keuntungan. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2017). Yang mana seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah yang bertujuan untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat (Undang Undang Republik Indonesia, 2014). Hal ini juga menunjukkan pentingnya pengendalian intern BPR yang memberikan jaminan yang masuk akal jaminan lengkap sulit dicapai dan sangat mahal. Selain itu, sistem pengendalian internal memiliki keterbatasan yang melekat, seperti kerentanan terhadap kesalahan dan kesalahan sederhana, penilaian dan pengambilan keputusan yang salah, penggantian manajemen, dan kolusi (Romney & Steinbart, 2017).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dikarenakan pendekatan kualitatif menekankan pada pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena; fokus dan multimetode, bersifat alami dan holistik; mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif (Yusuf, 2014). Hasil penelitian ini ditekankan pada memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diselidiki (Bangki et al., 2021).

Informan dalam penelitian ini adalah kepala bagian akuntansi, PE auditor internal, karyawan bagian kasir dan nasabah yang berkaitan dengan tujuan peneliti dengan pertimbangan yaitu informan tersebut adalah orang yang paling mengetahui tentang penerimaan kas PD BPR NTB Lombok Timur. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, peneliti akan menguji keabsahan data dengan menggunakan 1 kriteria dominasi yaitu

credibility (validitas interbal) antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan membercheck (Sugiyono, 2012). Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification (Sugiyono, 2012).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Job Description

1. **Direktur Utama**
Direktur utama merupakan pimpinan yang ada di BPR yang memiliki fungsi melakukan optimalisasi sumber daya yang ada di BPR sehingga dapat mewujudkan BPR yang sehat, maju, dan mandiri. Direktur utama memimpin, mengkoordinasikan dan memiliki tanggung jawab terkait semua kegiatan yang ada di BPR agar sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga tercapainya pertumbuhan laba perusahaan. Menyusun dan menjalankan rencana strategis dan anggaran tahunan serta penetapan kebijakan. Menyusun dan menyampaikan rencana tahunan dan anggaran kepada pemerintah daerah kabupaten Lombok Timur.
2. **Direktur**
Direktur merupakan bagian dari BPR yang berfungsi membantu direktur utama khususnya dalam pengoptimalisasian internal BPR. Menjaga kegiatan operasional agar sesuai dengan aturan baik aturan eksternal maupun internal. Membina hubungan baik dengan eksternal baik pemerintahan maupun non pemerintahan guna pelaksanaan pengembangan BPR. Melakukan koordinasi dan pengawasan serta pengarahan kepada staf dibawah direktur yang menekankan pada kegiatan operasional BPR.
3. **Pelayanan Operasional (POKP)**
Bagian pelayanan dibagi menjadi dua yaitu seksi pelayanan operasional dan seksi pelayanan administrasi/akuntansi. Seksi pelayanan operasional terdiri dari AO kredit, AO dana dan admin sedangkan seksi pelayanan administrasi/akuntansi terdiri dari teller. Pelayanan operasional bertugas memberikan pemahaman dan penjelasan kepada nasabah terkait dengan transaksi yang dilakukannya, memberikan pelayanan terkait administrasi, melakukan pengesekan dokumen yang dibutuhkan perusahaan dalam pemberian kredit ataupun dana, melakukan monitoring terhadap nasabah yang telah diberikan kredit, menerima saran dan juga keluhan dari nasabah BPR.
4. **Divisi Pemasaran**
Divisi pemasaran dibagi menjadi dua bagian yaitu bagian kredit dan bagian likuidasi. Bagian kredit bertugas melakukan koordinasi bersama AO kredit khususnya terkait dengan kredit macet, membuat target penyelesaian kredit bermasalah, melakukan penyiataan jaminan dan juga penjualan jaminan, membuat laporan terkait nasabah yang ditangani yang akan diserahkan kepada direktur. Sedangkan bagian likuidasi bertugas membantu dan mendukung pelaksanaan pemeriksaan terkait dengan tingkat bunga peminjaman yang dilakukan 3 kali dalam dalam setahun serta menyusun rencana dan mengendalikan kegiatan yang berkaitan dengan persaingan antar perusahaan.
5. **Divisi Operasional**
Divisi operasional dibagi menjadi dua yaitu bagian umum dan SDM serta bagian akuntansi dan pelapor. Bagian umum dan SDM terdiri dari security, OB, penjaga kantor, dan sopir sedangkan bagian akuntansi terdiri dari staf kabag IT dan staf IT. Divisi operasional bertugas melakukan koordinasi, pengamanan dan pengarahan

terkait sistem dan prosedur pada kegiatan operasional BPR. Bagian umum dan SDM bertugas memberikan bantuan dan pelayanan kepada karyawan dan pimpinan, melakukan pengamanan baik didalam maupun diluar kantor BPR, dan membantu perusahaan khususnya terkait dengan transportasi yang berkaitan dengan kegiatan BPR. Sedangkan bagian akuntansi bertugas mengelola, mengatur dan bertanggung jawab atas proses pembukuan dan laporan kegiatan yang terjadi di BPR, melakukan pengecekan riwayat kredit nasabah, mengawasi dan mengendalikan kegiatan penarikan atau pengeluaran dana perusahaan, melakukan penerimaan laporan setiap akhir harinya, memberikan bantuan dan kemudahan terkait pelaksanaan audit intern maupun ekstern.

6. PE Audit

PE audit bertugas merencanakan proses audit periodik tahunan, melakukan pengecekan dan pengamanan prosedur aktivitas kerja agar sesuai dengan aturan sehingga tidak adanya penyimpangan, melakukan monitoring terkait dengan kegiatan audit yang akan dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan, mengkoordinasi dan membahas temuan-temuan yang ditemukan selama proses audit bersama dengan direksi, memberikan peran konsultan terkait dengan hasil temuan yang telah dilakukan.

7. PE MR dan Kepatuhan

PE MR dan kepatuhan memiliki tugas yaitu melakukan pengawasan terkait dengan resiko-resiko yang dimiliki BPR, melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan yang terjadi di BPR agar sesuai dan patuh terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku, melindungi BPR dari resiko-resiko akibat pelanggaran hukum atau ketentuan yang berlaku.

Penelitian ini menggunakan 4 perspektif yaitu pemberian wewenang, pengamanan asset dan catatan lainnya, pemisahan wewenang, catatan dan dokumen yang memadai. Penelitian ini telah menggunakan metode triangulasi dengan cara membandingkan hasil wawancara dari 4 narasumber. Berikut adalah penjelasan terkait dengan 4 perspektif tersebut :

Pemberian Wewenang

Pemberian wewenang yang ada di PD BPR NTB Lombok Timur sudah baik terlebih lagi terdapat struktur organisasi yang jelas. Pemberian tugas dan wewenang bagi karyawan sudah tercantum dalam Rencana Bisnis Bank yang mana didalamnya juga terdapat *reward* dan *punishment* bagi semua elemen yang ada dalam perusahaan. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, struktur organisasi yang terdapat di PD BPR NTB Lombok Timur sesuai dengan tugas dan wewenang yang ada. Wewenang yang ada juga sudah memiliki *reward* dan *punishment*nya masing-masing yang artinya bahwa pembagian tugas dan wewenang sudah dilakukan secara jelas dan terbuka bagi semua karyawan dan direksi yang ada dalam perusahaan. Pembagian otoritas juga sudah jelas sesuai dengan tugasnya masing-masing. Salah satu contoh yaitu pemberian wewenang dan otoritas bagi teller pada saat penerimaan kas yaitu jika jumlah kas dari Rp 0 – Rp 100.000.000.

Sedangkan jika penerimaan kas dari nasabah lebih dari Rp 100.000.000 maka harus menggunakan user dan password dari direksi yang memiliki wewenang tersebut. Pemberian wewenang untuk penarikan tabungan juga dilakukan oleh karyawan dan berkoordinasi dengan bagian pemasaran dan wewenang lainnya sesuai dengan yang telah disepaati bersama. Pada saat pengambilan keputusan yang dilakukan oleh direksi juga melibatkan anggota direksi dan divisi lainnya yang menggambarkan bahwa pemberian

otoritas bukan hanya untuk pimpinan saja melainkan dari seluruh pihak yang ada dalam PD BPR NTB Lombok Timur sehingga dari hal tersebut dijelaskan bahwa pemberian dan pemisahan wewenang yang ada di perusahaan sudah jelas dan bersifat terbuka bagi semua pihak yang terkait dengan PD BPR NTB Lombok Timur.

Pengamanan Aset dan Catatan Lainnya

Perusahaan Daerah BPR NTB Lombok Timur memiliki sebuah penyimpanan aset yang disebut kluse atau khasanah yang mana tempat ini merupakan tempat penyimpanan dokumen, catatan dan aset yang penting bagi perusahaan. Perusahaan daerah BPR NTB Lombok Timur memiliki pengamanan yang ketat terkait aset dan juga catatan-catatan penting lainnya. Perusahaan ini juga memiliki kluse atau khasanah untuk penyimpanan dokumen-dokumen penting milik BPR serta memiliki standar penyimpanan kas minimum bagi setiap kantor cabang yang ada di NTB khususnya Lombok Timur jika jumlah kas yang ada melebihi kapasitas, maka akan dilakukan penyimpanan di bank umum melalui giro atau tabungan. Setiap bulannya terdapat rekonsiliasi bahkan jika terdapat setoran dari instansi-instansi yang ada di Lombok Timur, pihak BPR akan mencetak buku setoran dan untuk penghitungan kas setiap haridilaksanakan sebagai bagian dari fungsi internal. Setiap minimal 1 kali dalam setahun, auditor akan melakukan audit dan inspeksi ke cabang-cabang untuk memeriksa fisik dan in verbal dan kebanyakan dari pemeriksaan tersebut memiliki hasil yang cocok antara fisik dan in verbal.

Pemisahan Wewenang

Perusahaan Daerah BPR NTB Lombok Timur memiliki pemisahan tugas dari setiap divisi atau bagian yang ada dalam perusahaan. Pembagian tugas tersebut telah tercantum ke dalam Rencana Bisnis Bank yang mana telah terdapat *punishment* bagi setiap bagian yang artinya bahwa seluruh elemen yang ada dalam perusahaan harus mematuhi tata aturan yang ada dalam perusahaan. Pemberian tugas juga tidak boleh melenceng dari kemampuan karyawan atau direksi yang diberikan wewenang tersebut. pemisahan tugas dan wewenang yang ada dalam PD BPR NTB Lombok Timur berjalan sesuai dengan Job Description dan fakta integritas yang telah tercantum dalam Rencana Bisnis Bank PD BPR NTB Lombok Timur. Kasus kecurangan dalam PD BPR NTB Lombok Timur pernah terjadi yang mana pihak yang melakukan kecurangan diberikan sanksi sesuai dengan tingkatan kesalahan yang dilakukan. Pelaku akan diinterogasi dan dibina sesuai dengan kesalahannya dan apabila kesalahannya sangat merugikan perusahaan, maka akan dipecat bahkan dilaporkan ke pihak berwenang. Sanksi tersebut sudah tercantum dalam Rencana Bisnis Bank yang bertujuan agar pemisahan tugas dan wewenang perusahaan berjalan efektif dan efisien.

Catatan dan Dokumen yang Memadai

Perusahaan Daerah BPR NTB Lombok Timur memiliki kwitansi, slip penerimaan dan validasinya sendiri yang mana validasi ini telah diakui secara nasional dan sah dalam hukum. Setiap pemeriksaan yang dilakukan baik oleh auditor internal maupun dari auditor eksternal pasti akan melakukan pengecekan terkait dengan proses pencatatan dan dokumen yang digunakan. Hal ini menandakan bahwa baik dikantor cabang maupun kantor pusat PD BPR NTB Lombok Timur telah menggunakan catatan dan dokumen yang memadai yang bersifat resmi dan sah. Prinsip kehati-hatian juga diterapkan dalam Perusahaan Daerah milik Pemkab Lombok Timur ini sehingga dokumen yang digunakan diakui benar oleh semua pihak dan tidak ada penyalah gunaan dari pihak manapun. Seperti halnya kwitansi yang pasti akan diperbaiki jika terdapat kekurangan paraf dan lain sebagainya. PD BPR NTB Lombok Timur tidak melakukan pemberian nomor seri bagi

dokumen yang digunakan tetapi menggunakan validasi. Tetapi untuk produk BPR seperti tabungan atau warkat deposito memiliki nomor urut.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian maka dapat di simpulkan bahwa Perusahaan Daerah BPR NTB Lombok Timur telah menetapkan dan melaksanakan sistem pengendalian intern terkait penerimaan kas dengan cukup baik, hal ini dapat dilihat melalui hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. PD BPR NTB Lombok Timur telah memiliki struktur organisasi yang jelas dan terbuka sehingga pemisahan tugas dan wewenang juga terlaksana dengan cukup baik. PD BPR NTB Lombok Timur telah melaksanakan unsur sistem pengendalian internal yaitu pemberian wewenang, pengamanan asset dan catatan lainnya, pemisahan tugas dan catatan serta dokumen yang memadai. Namun masih terdapat kekurangan yaitu terkait dengan perputaran jabatan khususnya mengenai kas. Hal ini sangat penting untuk menghindari kesempatan bagi pihak tertentu untuk melakukan kecurangan. Namun untuk mengatasi hal tersebut, PD BPR NTB Lombok Timur telah menerapkan sistem *reward* dan *punishment* bagi semua pihak yang terlibat dalam perusahaan.

REFERENSI

- Ardiansyah R, I. (2012). *Analisis Sistem Pengendalian Internal Atas Penjualan Hak Guna Pemakaian Tempat Usaha dan Penerimaan Kas secara Tunai pada PD. Pasar Jaya.*
- Aryani, E. R. (2011). *Pengaruh Good Corporate Governance Dan Struktur Kepemilikan Terhadap Agency Cost.*
- Bangki, R., Putra, R. A., & Taleba, H. (2021). *Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Kas Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Buton Selatan. 1(1), 1–10.*
- Basrie, H., Fuady, F., & Anwar, C. (2011). *Analisis Sistem Pengendalian Intern Atas Penjualan Dan Penerimaan Kas. 2(2), 203–216.*
- BPK, W. (2013). Bpk Temukan Kasus Senilai Rp56,98 Triliun. *Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.* https://www.bpk.go.id/assets/files/magazine/_selengkapnya_1406188633.pdf
- Delbufalo, E. (2018). Springer Briefs in Business: Agency Theory and Sustainability in the Global Supply Chain. In *Springer Publication* (Issue 2018937703). <http://www.springer.com/series/8860>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. 305, 68 hal.* <http://peraturan.go.id/peraturan/view.html?id=11e81db95b48b810c0bd303833303537>
- Pratama, F. (2012). *Analisis Simultan Insider Ownership , Hutang , Dan Dividen : Dalam Sudut Pandang Teori Keagenan (Agency Theory).*
- Rahayu, P. (2018). Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas Pada Pt. Bpr Bina Reksa Karyaartha Pare. *Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952.*
- Romney, B. M., & Steinbart, P. J. (2017). *Accounting Information Systems.*
- Sari, F. K. (2013). *Evaluasi Penerapan Pengendalian Intern Terhadap Penerimaan Kas Pada Rumah Sakit Umum Daerah Abepura. 1(4), 657–666.*
- Scott, W. R. (2015). *Financial Accounting Theory. Seventh Edition. Pearson Prentice Hall: Toronto.*
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* CV Alfabeta.
- Susanto, A. (2017). Sistem Informasi Akuntansi. In *Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952.*
- Undang Undang Republik Indonesia. (2014). *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014.*

- Wahyudi, N. A. (2021). BPK Catat Indikasi Kerugian Negara Rp773,8 Miliar dari 3 BUMD Pemprov DKI. *Bisnis.Com*. <https://jakarta.bisnis.com/read/20210712/77/1416546/bpk-catat-indikasi-kerugian-negara-rp7738-miliar-dari-3-bumd-pemprov-dki>
- Yusuf, A. M. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (1st ed.). Kencana.